

## PSBB Diberlakukan, Bantuan untuk Warga Terdampak Covid-19 Diharap Tepat Sasaran



<https://redkal.com/psbb-diberlakukan-bantuan-untuk-warga-terdampak-covid-19-diharap-tepat-sasaran/>

Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menjamin ketersediaan sembako bagi warga yang terdampak selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, dari data yang sudah diterimanya, ada 30.000 paket sembako yang siap dibagikan selama 14 hari masa PSBB. "Menurut kami anggarannya cukup dan ada 30.000 paket sembako. Dikatakan Ibnu, distribusi sembako akan disalurkan melalui ketua RT dan RW setempat. Untuk itu, kata dia, sosialisasi akan digunakan sebaik-baiknya untuk simulasi distribusi logistik agar penerapan PSBB dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. "Hari Rabu nanti akan ada simulasi-simulasi, termasuk distribusi logistik yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial dan BPBD," jelasnya.

Tak hanya menjamin ketersediaan sembako bagi warga yang terdampak, Ibnu menegaskan akan membangun posko dapur umum di setiap kecamatan. "Kita akan bangun posko-posko, termasuk posko untuk dapur induk di setiap kecamatan," tandasnya. Dia berharap, warga Kota Banjarmasin patuh selama 14 hari penerapan PSBB demi memutus mata rantai penularan Covid-19.

(Diringkas dari <https://regional.kompas.com/read/2020/04/21/11354781/30000-paket-sembako-siap-dibagikan-selama-penerapan-psbb-di-banjarmasin> )

Anggota DPRD dari Dapil Banjarmasin Barat, Deddy Sophian mengungkapkan, pada kegiatan reses atau penyerapan aspirasi ini, memang warga menanyakan tentang data, siapa saja penerima bantuan dari pemerintah setempat terhadap warga yang terdampak Covid-19.

"Ini yang akan kami sampaikan kepada pemerintah. Datanya harus valid, mana saja yang memang berhak menerima bantuan itu," kata Deddy Sophian.

Apalagi, ujar Deddy, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota ini akan segera diberlakukan. Warga juga menginginkan pemerintah turut memberikan kompensasi, menyediakan dan memberikan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD).

“Kalau PSBB ini berlaku, warga wajib menggunakan masker pada saat keluar rumah. Makanya mereka menginginkan adanya bantuan APD. Tapi kemarin kami juga sudah membagikan ribuan masker kepada warga,” ucapnya.

Dengan diberlakukannya PSBB, politikus PKB ini mengimbau warga di Kota Seribu Sungai, agar menaati aturan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menanggulangi dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD dari Dapil Banjarmasin Barat, Gusti Yuli Rahman.

Ia erharap, bantuan dari pemerintah setempat segera diberikan sebelum PSBB ini diberlakukan. “Jangan sampai ini menjadi polemik baru. Warga terpaksa di rumah, sementara bantuan bagi mereka yang terdampak Covid-19 belum disalurkan. Ini jangan sampai terjadi,” ingatnya.

Sementara itu, legislator Dapil Banjarmasin Barat lainnya, Arufah Arif dari Fraksi PPP mengatakan, selain membahas usulan terkait infrastruktur pada reses kali ini, pihaknya juga menyampaikan sosialisasi terkait penanganan dan pencegahan Covid-19 kepada konstituen.

Namun, diakui Arufah, sebagian warga masih ada yang belum memahami terkait pemberlakuan PSBB di kota ini. “Makanya kami juga menyampaikan itu, agar warga paham dan dapat mematuhi anjuran pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” bebernya.

Dengan kondisi ini pula, pihaknya meminta pemerintah setempat mengawal PSBB dengan maksimal. “Ini harus dikawal, warga pun harus membantu pemerintah dalam melaksanakan program ini,” katanya.

Kegiatan penelaahan dan aspirasi masyarakat DPRD Banjarmasin di Kelurahan Pelambuan kali ini juga di hadiri anggota lainnya. Ananda dari Fraksi Partai Golkar, M Yamin dari Fraksi Partai Gerindra, Darma Sri Handayani dari Fraksi Golkar, Rinda Herliani dan Mira Farlani dari Fraksi PAN, serta Saut Nathan Samosir dari Fraksi PDIP.

(Diringkas dari <https://redkal.com/psbb-diberlakukan-bantuan-untuk-warga-terdampak-covid-19-diharap-tepat-sasaran/>)

## Sumber Berita:

1. <https://kompas.id>, *30.000 Paket Sembako Siap Dibagikan Selama Penerapan PSBB di Banjarmasin*, 21 April 2020.
2. <https://redkal.com>, *PSBB Diberlakukan, Bantuan untuk Warga Terdampak Covid-19 Diharap Tepat Sasaran*, 23 April 2020.

## Catatan:

### 🌟 **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

#### **Pasal 26**

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

### 🌟 **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

#### **Pasal 30**

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. individu dan/atau keluarga;
  - b. masyarakat; dan
  - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.